

VI. PERATURAN DESA TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
REALISASI PELAKSANAAN APBDESA



KEPALA DESA
KABUPATEN SLEMAN

PERATURAN DESA
NOMOR TAHUN.....

T E N T A N G

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN

DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA

Menimbang : bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 45 Peraturan Bupati Sleman Nomor 9 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor Tahun 2016, Kepala Desa wajib menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa kepada Bupati yang ditetapkan dengan Peraturan Desa, untuk itu maka perlu menetapkan Peraturan Oesa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran.....;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2010 Nomor 2 Seri D);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2016 Nomor 2 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Nomor 103);
7. Peraturan Bupati Sleman Nomor 9 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Sleman Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sleman Nomor 9 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
8. Peraturan Desa Nomor.... Tahun..... tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran

Dengan Keepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
dan
KEPALA DESA

MEMUTUSKAN

Menetapkan : LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI
PELAKSANAAN ANGGARAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DESA TAHUN
ANGGARAN

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	Rp.....
2. Belanja Desa	
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp.....
b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp.....
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	Rp.....
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	Rp.....
e. Bidang Tidak Terduga	Rp.....
Jumlah Belanja	Rp.....
Surplus/Defisit	Rp.....

3. Pembiayaan Desa

- a. Penerimaan Pembiayaan
b. Pengeluaran Pembiayaan
Selisih Pembiayaan (a – b)

Rp.

Rp.

Rp.....

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai hasil pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini terdiri dari:

1. Lampiran I : Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran;
2. Lampiran II: Laporan Kekayaan Milik Desa Sampai dengan 31 Desember;
2. Lampiran II: Laporan Program Sektoral dan Program Daerah yang masuk ke desa.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa

Ditetapkan di

Pada tanggal

KEPALA DESA

Tanda tangan

.....NAMA.....

Diundangkan di Desa

pada tanggal

SEKRETARIS DESA

Tandatangan

.....NAMA.....

LEMBARAN DESA..... TAHUN NOMOR

LAMPIRAN I
PERATURAN DESA
NOMOR TAHUN
TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
REALISASI PELAKSANAAN APBDESA
TAHUN ANGGARAN

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN APBDESA
PEMERINTAH DESA
TAHUN ANGGARAN.....

KODE REKENING						URAIAN	ANGGAR -AN (Rp)	REA- LISASI (Rp)	LEBIH/ KURANG (Rp)	KETE- RANG- AN
1						PENDAPATAN DESA				
1	1					Pendapatan Asli Desa				
1	1	1				Hasil Usaha				
1	1	1	1			Hasil laba BUMDesa				
1	1	2				Hasil Aset Desa				
1	1	2	1			Tanah desa				
1	1	2	2			Pasar desa				
1	1	2	3			Pasarhewan				
1	1	2	4			Bangunan desa				
1	1	2	4	1		Kios desa				
1	1	2	4	2		Gedung pertemuan desa				
1	1	2	4	3		Gedung olah raga desa				
1	1	2	4	4		Banguan desa lainnya				
1	1	2	5			Hutan milik desa				
1	1	2	6			Mata air milik desa				
1	1	2	7			Pemandian umum				
1	1	2	8			Obyek rekreasi desa				
1	1	2	9			Lapangan desa				
1	1	2	10			Aset desa lainnya				
1	1	3				Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong				
1	1	3	1			Swadaya dan partisipasi				
1	1	3	2			Gotong royong				
1	1	4				Lain-lain Pendapatan Asli Desa				
1	1	4	1			Pungutan desa				
1	1	4	2			Hasil penjualan kekayaan desa selain tanah yang dipisahkan				
1	1	4	3			Hasil pelepasan tanah desa tahun berjalan				
1	1	4	4			Bunga simpanan uang di bank				
1	2					Pendapatan Transfer				
1	2	1				Dana Desa				

1	2	2				Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah				
1	2	3				Alokasi Dana Desa				
1	2	4				Bantuan keuangan dari APBD Provinsi				
1	2	5				Bantuan keuangan dari APBD Kabupaten				
1	3					Pendapatan Lain lain				
1	3	1				Hibah dan Sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat				
1	3	2				Lain-lain Pendapatan Desa yang sah				
1	3	2	1			Hasil kerjasama dengan pihak ketiga				
1	3	2	2			Bantuan perusahaan yang berlokasi di desa				
2						BELANJA DESA				
2	1					BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA				
2	1	1				Pembayaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa				
2	1	1	1			Belanja Pegawai				
2	1	1	1	1		Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat				
2	1	1	1	1	1	Penghasilan tetap Kepala Desa				
2	1	1	1	1	2	Penghasilan tetap Perangkat Desa				
2	1	1	1	2		Penghasilan staf Pemerintah Desa				
2	1	1	1	2	1	Penghasilan staf Pemerintah Desa				
2	1	1	1	3		Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa				
2	1	1	1	3	1	Tunjangan Kepala Desa				
						- Tunjangan Kesehatan				
						- Tunjangan Kecelakaan				
						- Tunjangan Kematian				
						- Tunjangan lain-lain				
2	1	1	1	3	2	Tunjangan Perangkat Desa				
						- Tunjangan Kesehatan				
						- Tunjangan Kecelakaan				
						- Tunjangan Kematian				
						- Tunjangan lain-lain				
2	1	1	1	3	3	Tunjangan Staf Pemerintah Desa				
						- Tunjangan Kesehatan				
						- Tunjangan Kecelakaan				
						- Tunjangan Kematian				
						- Tunjangan lain-lain				
2	1	1	1	4		Tunjangan Pejabat/Plt Kepala Desa dan Perangkat Desa				
2	1	1	1	4	1	Tunjangan Pejabat/Plt Kepala Desa				
2	1	1	1	4	2	Tunjangan Plt Perangkat Desa				
2	1	2				Operasional Perkantoran Desa				
2	1	2	1			Belanja Pegawai				
2	1	2	1	6		Tunjangan pengelola keuangan dan aset desa				
2	1	2	1	6	1	Tunjangan Bendahara Desa				

2	1	2	1	6	2	Tunjangan Pembantu Bendahara Desa				
2	1	2	1	6	3	Tunjangan Pengurus Aset Desa				
2	1	2	1	6	4	Tunjangan Pembantu Pengurus Aset Desa				
2	1	2	2			Belanja Barangdan Jasa				
2	1	2	2	1		Belanja alat tulis kantor				
2	1	2	2	2		Belanja perlengkapan kantor				
2	1	2	2	3		Belanja peralatan kantor				
2	1	2	2	4		Belanja alat kebersihan				
2	1	2	2	5		Belanja telepon				
2	1	2	2	6		Belanja air				
2	1	2	2	7		Belanja listrik				
2	1	2	2	8		Belanja surat kabar / majalah				
2	1	2	2	9		Belanja materai/perangko				
2	1	2	2	10		Belanja jasa kebersihan				
2	1	2	2	11		Belanja langgan internet				
2	1	2	2	12		Belanja pemeliharaan bangunan dan atau gedung				
2	1	2	2	13		Belanja pemeliharaan peralatan kantor				
2	1	2	2	14		Belanja pemeliharaan perlengkapan kantor				
2	1	2	2	15		Belanja pemeliharaan komputer				
2	1	2	2	16		Belanja pemeliharaan kendaraan dinas				
2	1	2	2	17		Belanja pemeliharaan taman				
2	1	2	2	24		Belanja Cetak dan penggandaan				
2	1	2	2	24	1	Belanja penggandaan				
2	1	2	2	24	2	Belanja cetak dan jilid				
2	1	2	2	26		Belanja sewa perlengkapan dan per alat kantor				
2	1	2	2	26	1	Belanja sewa meja dan kursi				
2	1	2	2	26	2	Belanja sewa tenda				
2	1	2	2	26	3	Belanja sewa sound system				
2	1	2	2	26	4	Belanja sewa dokumentasi				
2	1	2	2	27		Belanja Makanan dan minuman				
2	1	2	2	27	1	Belanja makanan dan minuman rapat				
	1	2	2	27	2	Belanja makanan dan minuman penerimaan				
2	1	2	2	27	3	Belanja makanan dan minuman tamu				
2	1	2	2	28		Belanja pakaian dinas				
2	1	2	2	28	1	Belanja pakaian dinas Kepala Desa				
2	1	2	2	28	2	Belanja pakaian dinas perangkat				
2	1	2	2	28	3	Belanja pakaian dinas staf desa				
2	1	2	2	29		Belanja perjalanan dinas				
2	1	2	2	29	1	Perjalanan dinas dalam daerah				
2	1	2	2	29	2	Perjalanan dinas luar daerah				
2	1	2	2	29	3	Bantuan uang transportasi				
2	1	2	2	30		Belanja bahan bakar minyak (BBM)				
2	1	2	2	31		Uang tenaga kerja				
2	1	2	2	32		Honorarium narasumber/ ahli				

2	1	2	2	37		Operasional Kepala Desa dan Perangkat Desa					
2	1	2	2	37	1	Operasional Kepala Desa					
2	1	2	2	37	2	Operasional Perangkat Desa					
2	1	2	3			Belanja Modal					
2	1	2	3	2		Belanja modal sarana prasarana perkantoran					
2	1	2	3	2	1	Belanja printer/komputer					
2	1	2	3	2	2	Belanja meja kursi					
2	1	2	3	2	3	Belanja lemari					
2	1	2	3	2	4	Belanja filling cabinet					
2	1	2	3	2	5	Belanja rak arsip					
2	1	2	3	2	6	Belanja modal gedung kantor					
2	1	2	3	2	7	Belanja kendaraan dinas					
2	1	2	3	2	8	Belanja sarana prasarana perkantoran lainnya					
2	1	3				Pembayaran Tunjangan BPD dan Operasional BPD					
2	1	3	1			Belanja Pegawai					
2	1	3	1	5		Tunjangan BPD					
2	1	3	1	5	1	Tunjangan Ketua BPD					
2	1	3	1	5	2	Tunjangan Sekretaris BPD					
2	1	3	1	5	3	Tunjangan Anggota BPD					
2	1	3	2			Belanja Barang dan Jasa					
2	1	3	2	1		Belanja alat tulis kantor					
2	1	3	2	2		Belanja perlengkapan kantor					
2	1	3	2	3		Belanja peralatan kantor					
2	1	3	2	24		Belanja cetak dan penggandaan					
2	1	3	2	24	1	Belanja penggandaan					
2	1	3	2	24	2	Belanja cetak dan jilid					
2	1	3	2	27		Belanja makanan dan minuman					
2	1	3	2	27	1	Belanja makanan dan minuman rapat					
2	1	3	2	27	2	Belanja makanan dan minuman peninjauan					
2	1	2	2	28		Belanja pakaian dinas					
2	1	2	2	28	4	Pakaian dinas anggota BPD					
2	1	2	2	29		Belanja perjalanan dinas					
2	1	2	2	29	1	Perjalanan dinas dalam daerah					
2	1	2	2	29	2	Perjalanan dinas luar daerah					
2	1	2	2	29	3	Bantuan uang transportasi					
2	1	2	2	30		Belanja bahan bakar minyak (BBM)					
2	1	3	1	36		Uang Sidang BPD					
2	1	4				Pembayaran Insentif RT/RW dan Operasional RT/ RW					
2	1	4	2			Belanja Barang dan Jasa					
2	1	4	2	1		Belanja alat tulis kantor					
2	1	4	2	2		Belanja perlengkapan kantor					

2	1	4	2	3		Belanja peralatan kantor				
2	1	4	2	24		Belanja cetak dan penggandaan				
2	1	4	2	24	1	Belanja penggandaan				
2	1	4	2	24	2	Belanja cetak dan jilid				
2	1	4	2	35		Insentif RT/RW				
2	1	4	2	35	1	Insentif RT				
2	1	4	2	35	2	InsentifRW				
2	1	5				Kegiatan Intensifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah				
2	1	5	2			Belanja Barang dan Jasa				
2	1	5	2	1		Belanja alat tulis kantor				
2	1	5	2	24		Belanja Cetak dan penggandaan				
2	1	5	2	24	1	Belanja penggandaan				
2	1	5	2	24	2	Belanja cetak dan jilid				
2	1	5	2	27		Belanja Makanan dan minuman				
2	1	5	2	27	1	Belanja makanan dan minuman rapat				
2	1	5	2	27	2	Belanja makanan dan minuman peninjauan				
2	1	5	2	29		Belanja perjalanan dinas				
2	1	5	2	29	1	Perjalanan dinas dalam daerah				
2	1	5	2	29	2	Perjalanan dinas luar daerah				
2	1	5	2	29	3	Bantuan uang transportasi				
2	1	5	2	32		Honorarium narasumber/ ahli				
2	1	5	2	33		Honorarium tim kegiatan				
2	1	5	2	38	1	Pembayaran pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan tanah kas desa (PBB P2 TKD)				
2	1	5	3			Belanja Modal				
2	1	5	3	2		Belanja modal sarana prasarana perkantoran				
2	1	5	3	2	1	Belanja printer/ komputer				
2	1	5	3	2	4	Belanja filling cabinet				
2	1	5	3	2	5	Belanja rak arsip				
2	1	5	3	2	7	Belanja kendaraan dinas				
2	1	5	3	2	8	Belanja sarana prasarana perkantoran lainnya				
2	1	6				Kegiatan.....				
2	1	..				Kegiatan.....				
2	1	41				Kegiatan Pengadaan Tanah Desa				
2	1	41	2			Belanja Barang dan Jasa				
2	1	41	2	33		Honorarium tim kegiatan				
2	1	41	2	39		Belanja sertifikasi tanah				
2	1	41	3			Belanja Modal				
2	1	41	3	1		Belanja Modal Tanah				
2	1	41	3	1	1	Belanja modal tanah				
2	2					BIDANG PELAKSANAAN				

[illegible]

						kebencanaan				
2	2	1	3	6	2	Belanja modal peralatan/perlengkapan keamanan, ketertiban, dan kebakaran				
2	2	1	3	6	3	Belanja modal pembangunan gedung seni dan budaya				
2	2	1	3	6	4	Belanja modal peralatan/perlengkapan seni dan budaya				
2	2	1	3	6	5	Belanja modal pembangunan gedung keagamaan/ tempat ibadah				
2	2	1	3	6	6	Belanja modal peralatan/perlengkapan keagamaan				
2	2	1	3	6	7	Belanja modal Pembangunan sarana dan prasarana sosial, seni, budaya, dan keagamaan lainnya				
2	2	1	3	7		Belanja Modal Pembangunan sarana dan prasarana pendidikan				
2	2	1	3	7	1	Belanja modal gedung untuk kegiatan pendidikan				
2	2	1	3	7	2	Belanja modal bahan ajar pendidikan				
2	2	1	3	7	3	Belanja modal peralatan pendidikan				
2	2	1	3	7	4	Belanja modal gedung taman bacaan/ perpustakaan				
2	2	1	3	7	5	Belanja modal buku perpustakaan				
2	2	1	3	7	6	Belanja Modal Pembangunan sarana dan prasarana pendidikan lainnya				
2	2	1	3	8		Belanja Modal Pembangunan sarana dan prasarana kesehatan				
2	2	1	3	8	1	Belanja modal bangunan untuk kegiatan kesehatan				
2	2	1	3	8	2	Belanja modal bahan kesehatan				
2	2	1	3	8	3	Belanja modal peralatan kesehatan				
2	2	1	3	8	4	Belanja Modal Pembangunan sarana dan prasarana kesehatan lainnya				
2	2	2				Kegiatan.....				
2	2	3				Kegiatan.....				
2	3					BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA				
2	3	1				Kegiatan				
2	3	1	2			Belanja Barang dan Jasa				
2	3	1	2	1		Belanja alat tulis kantor				
2	3	1	2	24		Belanja Cetak dan penggandaan				
2	3	1	2	24	1	Belanja penggandaan				
2	3	1	2	24	2	Belanja cetak dan jilid				
2	3	1	2	26		Belanja sewa perlengkapan dan peralatan kantor				
2	3	1	2	26	1	Belanja sewa meja dan kursi				
2	3	1	2	26	2	Belanja sewa tenda				
2	3	1	2	26	3	Belanja sewa soundsystem				
2	3	1	2	26	4	Belanja sewa dokumentasi				
2	3	1	2	27		Belanja Makanan dan minuman				
2	3	1	2	27	1	Belanja makanan dan minuman rapat				
2	3	1	2	27	2	Belanja makanan dan minuman				

							peninjauan						
2	3	1	2	29			Belanja perjalanan dinas						
2	3	1	2	29	1		Perjalanan dinas dalam daerah						
2	3	1	2	29	2		Perjalanan dinas luar daerah						
2	3	1	2	29	3		Bantuan uang transportasi						
2	3	1	2	32			Honorarium narasumber/ ahli						
2	3	1	2	32			Honorarium tim kegiatan						
2	3	1	2	34			Pemberian barang kepada masyarakat/ kom pok masyarakat						
2	3	1	3				Belanja Modal						
2	3	1	3	2			Belanja modal sarana prasarana perkantoran						
2	3	1	3	2	1		Belanja printer/ komputer						
2	3	1	3	2	4		Belanja filling cabinet						
2	3	1	3	2	5		Belanja rak arsip						
2	3	1	3	2	7		Belanja kendaraan dinas						
2	3	2					Kegiatan.....						
2	3	3					Kegiatan.....						
2	4						BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA						
2	4	1					Kegiatan						
2	4	1	2				Belanja Barang dan Jasa						
2	4	1	2	1			Belanja alat tulis kantor						
2	4	1	2	24			Belanja Cetak dan penggandaan						
2	4	1	2	24	1		Belanja penggandaan						
2	4	1	2	24	2		Belanja cetak dan jilid						
2	4	1	2	26			Belanja sewa perlengkapan dan peralatan kantor						
2	4	1	2	26	1		Belanja sewa meja dan kursi						
2	4	1	2	26	2		Belanja sewa tenda						
2	4	1	2	26	3		Belanja sewa soundsystem						
2	4	1	2	26	4		Belanja sewa dokumentasi						
2	4	1	2	27			Belanja Makanan dan minuman						
2	4	1	2	27	1		Belanja makanan dan minuman rapat						
2	4	1	2	27	2		Belanja makanan dan minuman peninjauan						
2	4	1	2	29			Belanja perjalanan dinas						
2	4	1	2	29	1		Perjalanan dinas dalam daerah						
2	4	1	2	29	2		Perjalanan dinas luar daerah						
2	4	1	2	29	3		Bantuan uang transportasi						
2	4	1	2	32			Honorarium narasumber/ ahli						
2	4	1	2	33			Honorarium tim kegiatan						
2	4	1	2	34			Pemberian barang kepada masyarakat/ kom pok masyarakat						
2	4	1	3				Belanja Modal						

2	4	1	3	2		Belanja modal sarana prasarana perkantoran				
2	4	1	3	2	1	Belanja printer/komputer				
2	4	1	3	2	4	Belanja filling cabinet				
2	4	1	3	2	5	Belanja rak arsip				
2	4	1	3	2	7	Belanja kendaraan dinas				
2	4	2				Kegiatan.....				
2	4	3				Kegiatan.....				
2	5					BIDANG TIDAK TERDUGA				
						JUMLAH BELANJA				
						SURPLUS / DEFISIT				
3						PEMBIAYAAN				
3	1					Penerimaan Pembiayaan				
3	1	1				SILPA				
3	1	2				Pencairan Dana Cadangan				
3	1	3				Hasil Kekayaan Desa Yang di pisahkan				
						JUMLAH (RP)				
3	2					Pengeluaran Pembiayaan				
3	2	1				Pembentukan Dana Cadangan				
3	2	2				Penyertaan Modal Desa				
						JUMLAH (RP)				
						Pembiayaan Netto (Penerimaan pembiayaan dikurangi pengeluaran pembiayaan)				
						SilPA tahun berjalan (Selisih antara pembiayaa netto dengan hasil surplus/ defisit)				

....., tanggal.....

KEPALA DESA

Tanda Tangan

.....NAMA.....